

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

(Studi Kasus Desa di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur)

Hafidh Sholahuddin Abdul Aziz

30.0804

Asdaf Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Progam Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: sholahuddinhafidh@gmail.com

ABSTRACT

Problems/ Background (GAP): *Technological advances are currently having a positive impact on human resources. With a variety of sophistication of the system to make a job more effective time and cost. Nganjuk Regency is one of the regencies that has many villages and sub-districts. Each of which has its own character and characteristics.* **Purpose:** *to find out how far the evaluation of the development of villages and sub-districts in Nganjuk Regency has progressed, as well as to analyze what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of these regulations.* **Method:** *This study uses a qualitative research with an inductive approach. Sources of data using primary and secondary data sources. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques were obtained through reduction, data presentation, verification and drawing conclusions.* **Results/Findings:** *The results of the study show that the implementation of this Permendagri regulation has been going quite well in Nganjuk Regency as evidenced by the addition of fast growing villages each year. Community participation plays an important role in this regard, as well as the resources for service employees, sub-districts, and village officials who are able to properly protect the community so that the program of activities in the village runs well.* **Conclusion:** *Village and sub-district development evaluations have been fully carried out by village officials and supported by village community participation. And supported by today's technology that has been enjoyed by all village communities. However, there are still unscrupulous members of the public who are still not aware of the importance of administration, especially population.*

Keyword: Implementation, Participation, Technology

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kemajuan teknologi saat ini membuat dampak positif bagi sumber daya manusia. Dengan berbagai canggihnya sistem membuat suatu pekerjaan lebih efektif waktu dan biayanya. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai banyak desa dan kelurahan. Yang mana masing masing memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. **Tujuan:** untuk mengetahui sejauh mana perkembangan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, serta menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat penerapan regulasi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kuaalitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi permendagri ini sudah berjalan cukup baik di Kabupaten Nganjuk dibuktikan dengan penambahan desa cepat berkembang tiap tahunnya. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, dan juga sumber daya pegawai dinas, kecamatan, hingga perangkat desa yang mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga progam kegiatan di desa berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan didukung dengan partisipasi masyarakat desa. Serta didukung oleh teknologi masa kini yang sudah dinikmati semua masyarakat desa. Namun masih adanya oknum masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya administrasi terutama kependudukan.

Kata Kunci: Implementasi, Partisipasi, Teknologi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era *society* 5.0 saat ini, pemerintah tidak perlu lagi mengajar mulai dari nol tentang teknologi kepada masyarakat. Hampir setiap rumah di negeri ini sudah mempunyai telepon canggih atau yang biasa disebut *smartphone*. Yang mana hal tersebut berarti hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini sudah bisa mengakses segala jenis informasi tersebar di dunia ini. Mulai dari tausyiah agama, isu isu politik, perkembangan pendidikan, hingga *game online* yang sampai saat ini

menjadi hiburan bagi para generasi milenial. Kemajuan teknologi ini diibartkan seperti mata pisau yang berarti memiliki 2 sisi dalam satu benda. Bisa menjadi teman jika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa menjadi lawan jika menyalahgunakan fungsinya.

Suatu pemerintahan yang besar (pemerintah pusat) tidak akan bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik jika tidak didukung atau dimulai dari pemerintahan terkecil (desa dan kelurahan). Pemerintahan desa dan kelurahan harus mulai ditata, disusun, dan dikembangkan dengan baik agar mempermudah pemerintahan di atasnya. Perkembangan desa ini lah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu prinsip pemerintahan yang baik dilakukan. Perkembangan desa dan kelurahan sepatutnya perlu dilakukannya evaluasi tiap bulan hingga tiap tahunnya.

Kabupaten Nganjuk sendiri yang merupakan kabupaten dengan jumlah desa yang sangat banyak membuat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk tidak sama. Dari adat, budaya, serta cara mereka berkehidupan pun berbeda sehingga diperlukannya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu masih ditemukannya desa yang memiliki status kurang berkembang di Kabupaten Nganjuk. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemikiran seperti orang dulu yaitu semakin terbelakang status suatu desa maka semakin besar dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Padahal regulasi sekarang malah terbalik, dimana desa yang memiliki status cepat berkembang/ maju malah yang mendapatkan *reward* dana hibah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN NGANJUK**”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di

Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Dinas PMD**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Persentase Desa Cepat Berkembang yang masih sedikit	Peran lembaga	Sebagian besar pengurus lembaga kemasyarakatan desa belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
		Tata kelola administrasi pemerintahan desa kurang baik.	Rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat.
		Tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal	Budaya swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam masyarakat sudah mulai luntur

Sumber: Renstra DPMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

Melihat data pada tabel 1.2 dibawah ini bahwasanya persentase implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan selalu meningkat namun kepuasan masyarakat cenderung tetap Permasalahan yang muncul apa yang menjadikan pelayanan perizinan dan non perizinan online mengalami peningkatan namun indeks kepuasan masyarakat

cenderung stabil. Sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui pelayanan perizinan, faktor penghambat pelayanan perizinan.

Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Renstra Perangkat Daerah			Rasio Renstra Perangkat Daerah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100	100	100	89/2	94.5	100	89%	95%	100%
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	87.6	89/3	91.1	91.6	89.3	100	89%	100%	100%
3	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100	100	100	75.8	94.6	100	95%	100%	100%

Sumber: Renstra DPMD Kabupaten Nganjuk 2019-2024

Peneliti fokus terhadap peningkatan jumlah desa cepat berkembang sesuai dengan ungkapan dari Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, Hermin W menyampaikan bahwa sudah menyiapkan Tenaga Ahli dari Kementerian untuk mendampingi desa serta menghimbau kepada pihak desa untuk tidak takut menjadi desa cepat berkembang dan mau bekerja sama dalam menutupi kekurangan pada salah satu indikator dengan adanya pembangunan pada bidang tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi permendagri 81 tahun 2015. Penelitian Yola Melinda(2021) dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan memperoleh hasil bahwasanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada beberapa sub indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan masih belum terpenuhi. Penelitian Amri Juharza(2020) tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan

Kelurahan di Kecamatan Ukui yang memiliki hasil belum memiliki hasil yang baik karena masih banyaknya aspek yang belum memenuhi syarat untuk perkembangan desa/ kelurahan. Penelitian Pangeran Syandika(2022) tentang Implementasi Pelayanan Progam Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hasil belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masalah sosialisasi yang masih kurang. Adapun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil terkait teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan menggunakan teori ASOCA yang dicanangkan oleh Suradinata (2021) sedangkan penelitian Yola Melinda (2021), Amri Juharza (2020), dan Pangeran Syandika Ali (2022) tidak ada yang menggunakan teori tersebut. Kemudian lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, dan penelitian dilakukan setelah pandemik Covid-19.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian skripsi yang dilaksanakan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengaktualisasikan kegiatan lapangan yaitu mengamati, melihat, menganalisa atau mengkaji permasalahan yang sedang terjadi, dengan demikian peneliti dapat terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari pada lokasi penelitian. Penulisan ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan induktif, karena metode yang digunakan yaitu dengan cara berfikir dan berlandaskan hal yang umum ke khusus. Pendekatan induktif dapat memberikan solusi terhadap masalah yang telah terjadi dengan menemukan fakta. Dari fakta tersebut, kemudian dapat disimpulkan suatu kesimpulan umum dari sebuah keadaan.

Sumber data yang digunakan yaitu melalui person, yaitu dasar data berupa jawaban langsung berbentuk jawaban tertulis melalui wawancara. Orang yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan ialah pihak yang menjadi informan atau sumber data sebab dinilai memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Person dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dan masyarakat, place, yaitu dasar data berupa keadaan statis. Place dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dan juga beberapa desa dan kelurahan, dan paper, yaitu dasar data dalam menggambarkan tanda-tanda berbentuk huruf, angka, gambar atau simbol lainnya. Paper dalam

penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penerapan Implementasi Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan alat dan bahan penelitian berbentuk pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada informan penelitian yang beragam. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti bisa menentukan permasalahan yang lebih terbuka dan luas. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris DPMD, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa, dan masyarakat sebanyak 5 orang. Kemudian melalui observasi peneliti dapat mengetahui keadaan secara faktual dan aktual kondisi di lapangan dengan mengamati fenomena dan gejala sosial tentang implementasi permendagri yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Peneliti melaksanakan pengamatan terhadap setiap proses pemberian pelayanan yang kemudian disandingkan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian melalui dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari informan berupa dokumen, laporan-laporan tertulis, ataupun peraturan yang berhubungan terhadap Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Peneliti juga melakukan metode dokumentasi berupa foto, video ataupun rekaman suara tentang Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk .

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Prof Ermaya Suradinata dengan abakus ASOCA dikarenakan teknik analisis data ini sesuai dengan permasalahan dan keadaan di tempat penelitian yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk

Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan peningkatan jumlah desa cepat berkembang dan dapat disimpulkan untuk masing masing indikator dari teori implementasi menurut George Edward III yang mana memiliki empat indikator yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan juga Struktur Birokrasi. Berikut penjelasan kesimpulan di bawah ini:

a) Komunikasi, sosialisasi dari pihak dinas ke desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk sebagai hal mengingatkan dan monitoring sudah terlaksana cukup baik karena dilakukannya dalam tiga bulan sekali, dan bagi perangkat yang masih

memerlukan bantuan maupun bimbingan bisa langsung datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

b) Sumber Daya, untuk perangkat desa maupun perangkat di kelurahan mayoritas sudah tercukupi walaupun mungkin masih ada beberapa desa yang mengalami kebingungan terkait update data desa karena banyaknya tugas operator di desa. Kemudian untuk sarana prasarana beberapa desa sudah mendapatkan fasilitas berupa mobil siaga desa yang digunakan untuk membantu warga desa untuk masalah kesehatan.

c) Disposisi, olahraga tiap hari Jum'at pagi dilakukan secara rutin guna mempererat relasi pada semua pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Dan juga setiap istirahat siang mayoritas pegawai melakukan beradu pendapat dan juga berbagi permasalahan yang dirasakan di dalam kantor. Hal tersebut secara tidak langsung juga mengatasi hambatan-hambatan yang dialami semua pegawai di kantor tersebut.

d) Struktur Birokrasi, sudah berjalan cukup baik karena dapat dibuktikan melalui data perkembangan desa dari tahun ke tahun yang semakin membaik. Serta para perangkat desa yang mengalami masalah dapat juga langsung datang atau sekedar melalui media telepon untuk berkonsultasi mengenai permasalahan di desa maupun kelurahannya terutama masalah administrasi.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 di Kabupaten Nganjuk

Dalam suatu penerapan regulasi di suatu daerah tentunya menghadapi pro dan kontra dari masyarakat. Berikut penulis jelaskan masing masing faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk:

Faktor Pendukung:

1. Teknologi

Di masa sekarang atau yang lebih dikenal dengan zaman now ini. Masyarakat dihadapkan kepada pilihan mengikuti arus atau melawan arus. Melawan arus disini bukan berarti menolak semua kemajuan, akan tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip orang lama yaitu tidak sepenuhnya mengandalkan kemajuan zaman. Tapi di sisi lain para generasi muda atau biasa disebut gen z ini yang serba canggih dalam mengoperasikan teknologi di manapun.

2. Pegawai yang berkompeten

Dalam hal ini sumber daya manusia sudah menjadi hal penting dalam menjalankan semua progam kegiatan. Kompetensi yang dimiliki seorang pegawai sudah pasti tidak diragukan lagi. Termasuk juga operator desa, sebelum menjadi operator tentunya sudah melakukan training operator sebelum diangkat menjadi operator karena berkaitan langsung dengan data.

3. Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat berperan penting dalam penilaian desa dan kelurahan. Hal itu sudah menjadi rumus dalam meningkatkan kualitas desa dalam mencapai target yang direncanakan sebelumnya. Kekompakan masyarakat juga memberikan timbal balik kepada mereka karena sekarang desa yang memiliki nilai yang tinggi yang mendapatkan banyak tambahan dana terkait pembangunan desa dan lain sebagainya.

Faktor Penghambat:

1. Masalah data Kependudukan

Masalah kependudukan memanglah hal sepele namun sangat berpengaruh terhadap penilaian suatu wilayah administrasi, hal tersebut berdampak yang sangat panjang apabila tidak dilakukan pembaharuan terkait jumlah jiwa yang menduduki suatu desa maupun kelurahan.

2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas masing-masing desa dan kelurahan tentu tidak sama rata, hal ini juga menjadi faktor penting yang menjadikan suatu penghambat dalam perkembangan desa maupun kelurahan. Mungkin mayoritas desa sudah memiliki fasilitas kesehatan, tempat ibadah, karang taruna, kelompok tani, dan lain hal. Akan tetapi tidak semua desa dapat merawat fasilitas tersebut dengan baik. Sehingga banyak diantara bangunan fasilitas untuk masyarakat menjadi terbengkalai.

3. Anggaran

Permasalahan ini mungkin dialami oleh semua instansi dimanapun. Karena hal ini merupakan hal yang riskan kalau terkait permasalahan dana. Perbedaan desa dan kelurahan disini juga masalah anggaran, di desa terdapat dana desa akan tetapi di kelurahan tidak ada dana kelurahan. Maka penilaian terhadap desa dan kelurahan memiliki sedikit perbedaan. Karena semua program kegiatan selalu berhubungan dengan anggaran.

3.3 Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi hambatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pembina desa dan kelurahan disini masih merasa belum puas dalam memaksimalkan kinerjanya. Walaupun sudah cukup signifikan peningkatan dari tahun ke tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan beberapa usaha agar nantinya masalah-masalah dapat teratasi dengan baik. Berikut beberapa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi hambatan penerapan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan:

a. Melakukan pemberdayaan dan melakukan pendampingan di tingkat kecamatan melalui kontrol inventarisasi laporan, penagihan dan pembinaan. Jadi misalkan disuatu desa kurang berjalan dalam menerapkan aplikasi ini bisa dievaluasi oleh

pihak kecamatan melalui konsultasi dengan dinas agar bisa memberdayakan pegawai yang lain.

b. Melakukan rapat koordinasi dengan asisten pemerintahan, Dinas Dukcapil dan juga Badan Pusat Statistik untuk melakukan data kependudukan secara terpusat.

c. Konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi mengenai anggaran mobil siaga desa yang harus segera terpenuhi.

d. Mengadakan monitoring ke desa maupun kelurahan guna meninjau program kerja masyarakat.

e. Mengkoordinasikan ke pemerintah provinsi dan pusat terkait dana kelurahan yang seharusnya ada.

f. Melakukan kegiatan rapat dengan masyarakat dengan membahas aspirasi yang dikeluhkan dari masyarakat sehingga ditemukannya solusi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat membantu perangkat desa hingga pegawai dinas untuk selalu memperhatikan masalah administrasi desa yang harus selalu ditertibkan agar dapat menjadi desa teladan bagi desa yang lain.

Penertiban Administrasi ini juga mendukung desa dan kelurahan dalam pemberian dana hibah setelah dinyatakan sebagai desa cepat berkembang dan mampu mempertahankan selama tiga tahun. Karena masih adanya oknum dari masyarakat yang kurang memperhatikan terkait administrasi kependudukan sehingga menjadi salah satu faktor penghambat jalannya regulasi ini di Kabupaten Nganjuk. Kemudian upaya dinas untuk selalu meminimalisir faktor yang menjadi penghambat agar diharapkan tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk untuk menjadikan desa desa dan juga kelurahan di Nganjuk tidak kalah saing dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan peningkatan jumlah desa cepat berkembang tiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak mengalami hambatan-hambatan. Dimana faktor-faktor penghambat tersebut sudah mulai dilakukannya evaluasi yang diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam penilaian desa dan kelurahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan dengan satu analisis yaitu ASOCA.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban administrasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anur, Pangeran Syandika, 2019. “*Implementasi Pelayanan Progam Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah*” Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah.

Yola Melinda.2021.” Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Amri Juharza.2020.” Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ukui”. Tesis Universitas Islam Riau.

Suradinata, Ermaya 2021. *Analisis Kepemimpinana Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor

